



Janji Abraham Samad Dua Minggu Lagi

KPK Tangkap Malarangeng Cs

RAKYAT KALBAR. Kegagalan Ketua KPK Abraham Samad atas kasus proyek Hambalang berlanjut dengan menjanjikan akan segera menahan para tersangkanya. "Insya Allah satu dua minggu ke depan sudah ada (penahanan)," kata Abraham usai menjadi pembicara seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/5). Apa pasal sampai saat ini KPK tidak juga menahan empat tersangka Hambalang? Kata bekas pengacara dari Makassar ini, kalau buru-buru ditangkap khawatir akan termakan oleh batas waktu penahanan itu sendiri. Sementara perkara mereka belum selesai diberkas.

■ Halaman 6

KPK Tangkapdari halaman 1

"Kalau sudahangkap, kita akan lakukan penahanan. Jadi di situ hambatannya," katanya. Keempat tersangka adalah bekas Menpora Andi Malarangeng, bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar dan Direktur Operasi sekaligus Kepala Divisi Konstruksi 1 non aktif PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhammad Noor. Berkas belum kelar jadi bila ditahan KPK punya tiga tahapan. Pertama 20 hari, lalu diperpanjang 40 hari dan 30 hari lagi. Jika waktu tersebut lewat dan

berkas tak kunjung dilempar ke penuntutan, tersangka berhak protes dan menuntut bebas. Selain menunda penangkapan, Samad mengaku pihaknya sampai saat ini masih menghitung kerugian negara yang ditelan oleh proyek berbiaya Rp 2,5 triliun itu. Nah, seperti biasa, kelambanan proses penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beralasan supaya teliti.

Pasal Pencucian Uang Para tersangka dugaan korupsi di proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)

Hambalang, tak tertutup kemungkinan juga dijerat dengan pasal pencucian uang. "Semua kemungkinan itu terbuka," kata Abraham Samad.

Kendati begitu, sejauh ini menurut Samad, belum ada keputusan dari pihaknya untuk menjerat para tersangka dengan TPPU. Pihaknya masih terus melakukan proses pemeriksaan sejumlah saksi. "Nanti dari hasil itu penyidik akan memutuskan dengan gelar perkara (ekspose) dan akan menentukan apakah bisa dikenakan (TPPU) atau tidak," kata Samad. (RMOL)